A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NOMOR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha bersama tersebut dapat dimaknai dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia tersebut, Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia. Hal itu selaras dengan Asta Cita kedua yaitu komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Asta Cita ketiga melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi. Asta Cita kelima mengembangkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam. Asta Cita keenam melakukan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, Presiden mencanangkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Kopdes Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama lebih dari kepentingan individu, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, seperti rendahnya akses terhadap modal, pasar, serta peningkatan kualitas hidup yang merata.

Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Indonesia, memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, kerajinan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, potensi tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya, kurangnya pembinaan, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan. Dalam konteks inilah koperasi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memajukan ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan peluang usaha bersama yang saling menguntungkan.

Pembentukan Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dengan memberdayakan potensi lokal dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasinya, Presiden menginisiasi pembentukan 70.000 (tujuh puluh ribu) Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa. Adapun manfaat pembentukan Kopdes Merah Putih adalah sebagai berikut:

1. menekan inflasi;
2. memberikan *Service Request Intake* (setiap permintaan dilayani secara sistematis & cepat);
3. menekan harga di tingkat konsumen;
4. meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik;
5. menekan pergerakan tengkulak*;*
6. menciptakan lapangan kerja;
7. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
8. menjadi katup penyelamat guncangan ekonomi;
9. meningkatkan inklusi keuangan;
10. menjadi konsolidator UMKM; dan
11. menjadi wujud pemerataan ekonomi.

Kopdes Merah Putih dibentuk melalui 3 (tiga) mekanisme, yaitu:

1. pendirian koperasi baru yaitu membangun koperasi di desa yang belum terdapat Koperasi;
2. pengembangan koperasi yang telah ada yaitu mengembangkan kelembagaan dan unit usaha koperasi aktif yang telah ada di desa; dan
3. revitalisasi koperasi yaitu melakukan revitalisasi terhadap koperasi tidak aktif di desa.
4. Maksud dan Tujuan
   1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

* 1. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Baru, Pengembangan Koperasi yang telah ada, dan Revitalisasi Kopdes Merah Putih ini disusun dengan tujuan untuk:

1. memberikan panduan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
2. memudahkan masyarakat desa untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan pembentukan Kopdes Merah Putih meliputi:

1. pendirian koperasi baru;
2. pengembangan koperasi yang telah ada; dan
3. revitalisasi koperasi.
4. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
   3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
   4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
   5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).
5. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
3. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut- turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang, diantara para pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
6. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.
7. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
9. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
10. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
11. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
17. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.

**BAB II**

**MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENAMAAN**

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

1. Mekanisme Pembentukan

Mekanisme pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui:

* 1. pendirian Koperasi baru;
  2. pengembangan Koperasi yang telah ada; dan
  3. revitalisasi Koperasi.

1. Penamaan Koperasi

Pengajuan nama Koperasi untuk Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama desa setempat dengan format:

1. diawali dengan kata “Koperasi”;
2. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”dan
3. diakhiri dengan nama desa setempat.

Contoh: **“Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”**.

Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.

Contoh: **“Koperasi Syariah Desa Merah Putih Karangrejo”**.

**BAB III**

**PENDIRIAN KOPERASI BARU**

1. Pra Pendirian
2. Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah desa untuk membahas rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
3. Dalam pelaksanaan Musyawarah desa, calon Pendiri mempresentasikan rancangan usaha yang akan diselenggarakan oleh koperasi, meliputi: usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis serta kebutuhan modal dari usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa Merah Putih.
4. Rancangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b berguna dalam menentukan jenis KBLI serta pengurusan perizinan yang dibutuhkan Koperasi ketika akan mengoperasionalkan usaha.
5. Rancangan usaha tersebut juga berguna dalam merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota. Sehingga setoran modal dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib diturunkan dari prospektus bisnis yang telah disusun, bukan sekedar ditetapkan karena pertimbangan nominal yang paling terjangkau oleh anggota.
6. Pendirian
   1. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para Pendiri, dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten. Juga dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
   2. Rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
   3. Rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para Pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:
      * 1. nama Koperasi;
        2. nama para Pendiri;
        3. alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
        4. jangka waktu berdiri;
        5. maksud dan tujuan;
        6. keanggotaan Koperasi;
        7. perangkat organisasi Koperasi;
        8. modal Koperasi;
        9. besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
        10. bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
        11. mekanisme rapat anggota;
        12. pembagian sisa hasil usaha;
        13. perubahan Anggaran Dasar;
        14. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
        15. sanksi.
   4. NPAK mengajukan nama Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) sesuai dengan format penamaan Koperasi dengan melakukan penginputan pada SABH.
   5. Modal Pendirian Koperasi Desa Merah Putih terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah.
   6. Hasil rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar. Format konsep berita acara pendirian Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 1 Petunjuk Pelaksanaan ini.
   7. Notulen rapat dan/atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilengkapi dokumen sebagai berikut:
7. daftar hadir rapat pendirian;
8. fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir; dan
9. surat rekomendasi dari Kantor Desa setempat.
   1. Rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat dihadiri oleh NPAK.
   2. Dalam hal rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih dihadiri NPAK, NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
   3. Kuasa Pendiri menghadap NPAK untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
   4. Jenis Koperasi Desa Merah Putih terdiri atas:
10. Koperasi konsumen yaitu Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat;atau
11. Koperasi produsen yaitu Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.
12. Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
13. NPAK mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum melalui SABH dengan mengisi format pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
14. Dokumen untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih disimpan oleh NPAK meliputi:
15. minuta Akta Pendirian Koperasi beserta berkas pendukung;
16. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
17. surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan Hibah; dan
18. rencana kerja Koperasi.
19. Koperasi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
20. Koperasi Desa Merah Putih membuka rekening atas nama badan hukum Koperasi di bank.
21. Koperasi mendaftarkan hak akses pada *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan izin usaha berdasarkan KBLI sesuai pada Anggaran Dasar Koperasi Desa Merah Putih.
22. Koperasi melakukan operasional kegiatan usaha setelah mendapatkan izin usaha.

**BAB IV**

**PENGEMBANGAN KOPERASI YANG TELAH ADA**

* 1. Koperasi yang dipilih untuk dibangun dan dikembangkan harus memenuhi persyaratan:
     + - 1. memiliki status badan hukum dan legalitas badan hukum;
         2. memiliki sertifikat nomor induk Koperasi minimal Grade C yaitu Koperasi bersertifikat yang melaporkan hasil RAT minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
         3. beralamatkan di desa setempat;
         4. memiliki jenis Koperasi produsen dan konsumen;
         5. memiliki usaha; dan
         6. bentuk Koperasi adalah primer kabupaten.
  2. Koperasi melakukan rapat anggota perubahan Anggaran Dasar:

1. Agenda rapat perubahan anggaran dasar paling sedikit mengubah nama dan usaha Koperasi agar sesuai dengan program Koperasi Desa Merah Putih;
2. Hasil rapat anggota dituangkan dalam notulen berita acara rapat dilengkapi daftar hadir anggota;
3. Perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut bidang usaha wajib mencantumkan KBLI;
4. Kuasa Koperasi membawa berkas kelengkapan dokumen ke NPAK untuk dibuatkan minuta akta;
5. NPAK menuangkan hasil rapat anggota tentang perubahan Anggaran Dasar pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, konsep Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 2 Petunjuk Pelaksanaan ini**;**
6. NPAK mengakses SABH untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar Koperasi guna mendapatkan pengesahan/pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui SABH;
7. SABH menerbitkan pengesahan/pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi setelah permohonan diajukan oleh NPAK;
8. Pengesahan atau pelaporan perubahan Anggaran Dasar dikirimkan langsung kepada NPAK dari SABH untuk selanjutnya dicetak oleh NPAK untuk diserahkan kepada Koperasi;
9. Kementerian mengumumkan Surat Keputusan Pengesahan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB V**

**REVITALISASI KOPERASI**

Revitalisasi Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi dan usaha.

Parameter untuk kegiatan revitalisasi Koperasi menimbang:

1. aset yang dimiliki; dan
2. kewajiban Koperasi.

Tahapan dalam melakukan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih:

1. Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan pengurus Koperasi tersebut
2. Dinas bersama pengurus Koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap potensi Koperasi tersebut untuk direvitalisasi.
3. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan rapat anggota.
4. Rapat anggota paling sedikit menyepakati:
   1. Kesepakatan untuk ikut serta dalam program Koperasi Desa Merah Putih; dan
   2. melakukan Penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
5. Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dalam rangka Penggabungan badan hukum Koperasi.
6. Dinas melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima Penggabungan badan hukum Koperasi dan menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
7. Pengurus Koperasi menyerahkan berita acara perubahan (penggabungan atau revitalisasi) kepada NPAK.
8. NPAK mengunggah berita acara perubahan (penggabungan atau revitalisasi) pada SABH.
9. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar dikirimkan langsung kepada NPAK dari SABH untuk selanjutnya dicetak oleh NPAK kemudian diserahkan kepada Koperasi.
10. Kementerian mengumumkan Surat Keputusan Pengesahan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB VI**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN KOPERASI**

Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain yang disebut dengan Penggabungan atau dikenal dengan istilah amalgamasi (*vide* Pasal 14 ayat (1) dan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Adapun tahap penggabungan Koperasi sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan Penggabungan Koperasi sebagai berikut:

* 1. Pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan masing-masing melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
     1. mengadakan pertemuan dan Musyawarah Desa untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana Penggabungan Koperasi dan pembahasan atas hal lain terkait rencana Penggabungan;
     2. melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
     3. melakukan pengkajian tentang manfaat dan potensi dengan Penggabungan Koperasi serta pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota;
     4. memberikan penjelasan kepada anggota mengenai maksud dan tujuan melaksanakan Penggabungan;
     5. merumuskan kegiatan pokok yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan, dengan maksud agar Penggabungan Koperasi menjadi tertib, mengandung kepastian hukum, dan berhasil dengan baik; dan
     6. menuangkan hasil pertemuan tersebut dalam Notula atau Risalah Rapat tentang rencana Penggabungan Koperasi.
  2. Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan menyelenggarakan Rapat Anggota untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:
     1. memperoleh persetujuan dari anggota untuk rencana Penggabungan;
     2. menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam panitia Penggabungan dan diberi wewenang menandatangani perjanjian Penggabungan;
     3. menetapkan rencana tentang pemindahan aset dan pasiva Koperasi yang bersangkutan kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan, yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan;
     4. selain ketentuan di atas, khusus bagi Koperasi yang akan menggabungkan diri, menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian:

1. hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
2. pembayaran tagihan kepada kreditur; dan
3. ganti rugi kepada pihak terkait,

yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan; dan

* + 1. menuangkan hasil Rapat Anggota tersebut dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang rencana Penggabungan Koperasi.
  1. Pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan menyampaikan salinan Berita Acara Rapat Anggota tersebut kepada anggota, kreditur, pihak terkait, dan pejabat berwenang dalam rangka pemberitahuan tentang status Penggabungan Koperasi.
  2. Dalam hal anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri tidak bersedia menjadi anggota Koperasi yang akan menerima Penggabungan, menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada Pengurus Koperasinya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Berita Acara Rapat Anggota.
  3. Setiap kreditur Koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana Penggabungan Koperasi kepada Pengurus Koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan kepada pejabat Kementerian atau pejabat Dinas provinsi/kabupaten/kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi.
  4. Pihak lain yang karena perubahan status tersebut, yang mungkin akan mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana Penggabungan Koperasi.
  5. Pengajuan permintaan ganti rugi disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada Deputi yang membidangi Kelembagaan pada Kementerian dan Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tahap Kedua
   1. Setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat Penggabungan Koperasi yang dihadiri para kuasa dan masing-masing Koperasi yang akan bergabung.
   2. Rapat Penggabungan memutuskan tentang:
      1. susunan panitia Penggabungan yang keanggotaannya berasal dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan;
      2. tata cara pengalihan keanggotaan dari Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
      3. tata cara pengalihan aset dan kewajiban Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
   3. Panitia Penggabungan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
      1. membuat rancangan perjanjian Penggabungan Koperasi;
      2. menetapkan permodalan Koperasi dan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya;
      3. menetapkan:
2. pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
3. pembayaran tagihan kepada kreditur;
4. ganti rugi kepada pihak terkait,

termasuk dalam hal ini penetapan mekanisme penyelesaian kerugian dan pinjaman/pembiayaan kepada pihak terkait termasuk pinjaman/pembiayaan macet dari Koperasi yang akan menggabungkan diri;

* + 1. menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi hasil Penggabungan;
    2. menetapkan status pengelola dan karyawan Koperasi yang akan menggabungkan diri;
    3. menetapkan rancangan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
    4. menyelenggarakan Rapat Anggota Penggabungan Koperasi.

1. Tahap Ketiga
   1. Rapat Anggota Penggabungan Koperasi dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
   2. Dalam Rapat Anggota Penggabungan Koperasi diputuskan:
      1. rancangan perjanjian Penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan;
      2. pengesahan rancangan perubahan anggaran dasar Koperasi hasil Penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan; dan
      3. pengesahan keputusan atas:
2. pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
3. tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian pinjaman/pembiayaan dari para kreditur yang akan menjadi tanggungan Koperasi hasil Penggabungan; dan
4. tata cara pengalihan aset Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang disetujui sebagai hasil Penggabungan Koperasi.
   1. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian Penggabungan dilakukan oleh kuasa Rapat Anggota masing-masing Koperasi yang melakukan Penggabungan.
   2. Para Pengurus Koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak terkait yang dirugikan.
   3. Pengalihan aset dan pasiva Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang menerima Penggabungan, dimuat dalam Berita Acara pengalihan aset dan pasiva Penggabungan Koperasi.
   4. Pengalihan aset dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur Koperasi yang bersangkutan.
5. Tahap Keempat
   1. Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menghadap NPAK untuk dibuatkan akta perubahan Anggaran Dasar.
   2. Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengurus Koperasi yang menggabungkan diri segera menyelenggarakan rapat pembubaran Koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan.
7. Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Format Konsep Kesepakatan Bersama untuk Penggabungan Koperasi tercantum dalam Lampiran Nomor 3 Petunjuk Pelaksanaan ini.

**BAB VII**

**USAHA**

1. Usaha utama pada Koperasi Desa Merah Putih perlu memperhatikan:
   1. kebutuhan anggota;
   2. kelayakan usaha;
   3. potensi Desa;
   4. peluang pasar; dan
   5. pengembangan usaha di masa mendatang.
2. Dalam membuka suatu usaha, pengurus Koperasi Desa Merah Putih perlu menyusun proposal/studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisis:
   1. aspek pasar dan pemasaran;
   2. aspek teknis dan operasional;
   3. aspek manajemen dan organisasi;
   4. aspek keuangan dan permodalan;
   5. aspek legalitas dan perizinan; dan
   6. aspek sosial dan lingkungan.
3. Kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih meliputi:
   1. outlet gerai sembako;
   2. outlet gerai obat murah/apotek desa;
   3. outlet kantor koperasi;
   4. outlet unit simpan pinjam;
   5. outlet klinik desa;
   6. outlet *cold storage/cold chain;*
   7. outlet logistik (distribusi); dan
   8. kegiatan lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.
4. Koperasi Desa Merah Putih dapat menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usaha dan layanannya.
5. Untuk mendukung ekosistem digital Koperasi, dianjurkan agar Koperasi Desa Merah Putih memiliki situs dengan domain “*kop.id*” guna memperkuat identitas dan keterhubungan dalam ekosistem Koperasi.
6. Koperasi Desa Merah Putih dapat menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
7. Perizinan usaha Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/otoritas terkait masing-masing sektor usaha.
8. Koperasi Desa Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, antara lain:
9. Gerai Sembako meliputi :
   1. 47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;
   2. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional.
10. Obat-Obatan meliputi :
    1. 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik;
    2. 47723 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik;
    3. 47724 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia;
    4. 47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
    5. 47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
    6. 47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
    7. 47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;
    8. 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
11. Kantor meliputi :
    1. 47415 - Perdagangan Eceran Mesin;
    2. 77394 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.
12. Unit Simpan Pinjam Koperasi :
    1. 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
    2. 64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder;
    3. 64146 - Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer;
    4. 64148 - Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder.
13. Klinik Desa :
    1. 86102 - Aktivitas puskesmas;
    2. 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta;
    3. 86105 - Aktivitas klinik swasta;
    4. 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.
14. Aktivitas *Cold* *Storage* – 52102
15. Logistik meliputi :
    1. 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi;
    2. 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi

Angkutan Darat (EMKA & EAD);

* 1. 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
  2. 52295 - Angkutan Multimoda;
  3. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara;
  4. 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran.

1. Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman yang terstruktur bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Kami berharap agar petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi panduan teknis yang efektif dalam setiap tahapan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat desa serta menjadi contoh yang baik (*role model*) bagi desa lainnya dalam mengelola potensi ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kemajuan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

**Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit.**

Jakarta, Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

**AHMAD ZABADI**

NIP. 19680212 199303 1 001

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NOMOR TAHUN 2025

**Lampiran Nomor 1: Konsep Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PENDIRIAN**

**KOPERASI …………………………………………….**

Pada hari ini …………, tanggal ……………………………………. Pukul ……………………... Bertempat di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi ……………………………………………………., serta telah mendapatkan Penyuluhan dari ………………………………………………………. Tuan ………………………… dan ……………………………………… yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

* Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak **…….** (……………………..) orang pendiri koperasi.
* Bahwa agenda acara Rapat Pendirian Koperasi ………………………………………………….., sebagai berikut :

1. Pembahasan nama koperasi.
2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
3. Pembahasan bentuk koperasi.
4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
6. Pembahasan jenis koperasi.
7. Pembahasan usaha koperasi.
8. Pembahasan permodalan (simpanan pokok dan simpanan wajib) dan modal pendirian koperasi.
9. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
10. Pembahasan priode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
11. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
12. dan seterusnya ………………………………………………

* Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui nama : ……………………………………………………………………………….
2. Menyetujui  
   kedudukan/alamat : ……………………………………………………………………….……………………
3. Menyetujui bentuk : ………………………………………………………………………………
4. Menyetujui wilayah keanggotaan : …
5. Menyetujui jangka waktu berdiri :
6. Menyetujui jenis koperasi :
7. Menyetujui usaha koperasi :

* ……………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………
* ……………………………………………………………………………………

1. Menyetujui simpanan anggota :

* Simpanan pokok Rp. …………………../orang
* Simpanan wajib Rp. …………………./bulan/orang

1. Modal pendirian koperasi Rp. ………………………,.

Terdiri dari :

* Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp. ………………………………,.

* Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp. ………………………………,.

1. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)
2. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
3. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas ………………….. tahun
4. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

1. Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………………….

1. Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………………….

1. Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………………….

Untuk menghadap dan mendatangani minuta akta pendirian koperasi dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul …………….

Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat

(………………………..) (…………………………..)

Susunan Pengurus

Koperasi ……………………………………………………….

Periode ………… s/d ………………

KETUA

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

SEKRETARIS

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

BENDAHARA

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

Susunan Pengawas

Koperasi ………………………………………………………..

Periode ……………… s/d ………………..

KOORDINATOR

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

ANGGOTA 1

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

ANGGOTA 1

Nama : ……………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….

Alamat: ………………………………………………………………………………………

No. KTP : …………………………………………………………………………………….

**Daftar Hadir Rapat Pendirian**

**Koperasi………………………………………….**

Hari/Tanggal :

Tempat :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Nomor HP** | **Tanda Tangan** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Rekapitulasi Modal**

**( Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Simpanan Pokok (Rp)** | **Simpanan Wajib (Rp)** | **Jumlah (Rp)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | **Total** |  |

**FOTOKOPI KTP PENDIRI**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Lampiran Nomor 2: Konsep Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PERUBAHAN**

**KOPERASI …………………………………………….**

Pada hari ini …………, tanggal ……………………………………. Pukul ……………………... Bertempat di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, telah diadakan Rapat Perubahan Koperasi ……………………………………………………., serta telah mendapatkan Penyuluhan dari ………………………………………………………. Tuan ………………………… dan ……………………………………… yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

* Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak **……. (……………………..)** orang perubahan koperasi.
* Bahwa agenda acara Rapat Perubahan Koperasi ………………………………………………….., sebagai berikut :

1. Pembahasan nama koperasi.
2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
3. Pembahasan bentuk koperasi.
4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
6. Pembahasan jenis koperasi.
7. Pembahasan usaha koperasi.
8. Pembahasan permodalan (simpanan pokok dan simpanan wajib) dan modal perubahan koperasi.
9. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
10. Pembahasan priode jabatan susunan pengurus dan pengawas
11. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
12. dan seterusnya ………………………………………………

* Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan merubah Anggaran Dasar (contoh):

Menyetujui nama : …………………………………………………………………….

Menyetujui kedudukan/alamat :

Menyetujui bentuk :

Menyetujui wilayah keanggotaan :

Menyetujui jangka waktu berdiri :

Menyetujui jenis koperasi :

Menyetujui usaha koperasi : …………………………………………………………

Menyetujui simpanan anggota :

* Simpanan pokok Rp. …………………../orang
* Simpanan wajib Rp. …………………./bulan/orang

Modal perubahan koperasi Rp. ………………………,.

Terdiri dari :

* Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp. ………………………………..

* Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp. ………………………………..

Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)

Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)

Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas ………………….. tahun

Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi

Keputusan Rapat Perubahan tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

Untuk menghadap dan mendatangani minuta akta perubahan anggaran dasar koperasi dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul …………….

Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat

(………………………..) (……………………..)

Susunan Pengurus

Koperasi ……………………………………………………….

Periode ………… s/d ………………

KETUA

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

SEKRETARIS

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

BENDAHARA

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ………

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

Susunan Pengawas

Koperasi ………………………………………………………..

Periode ……………… s/d ………………..

KOORDINATOR

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

ANGGOTA

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

1. Nama

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ………

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Jabatan :

**Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran Dasar**

Hari/Tanggal :

Tempat :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Nomor HP** | **Tanda Tangan** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**FOTOKOPI KTP**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Lampiran Nomor 3: Konsep Kesepakatan Bersama tentang Penggabungan Koperasi**

KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG

PENGGABUNGAN KOPERASI

Pada hari ini ........ Tanggal ........ tahun ......... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ............. (nama pengurus) : Ketua Koperasi ..............................................

berkedudukan di Jalan .................................

Kelurahan Kecamatan

. Kabupaten/Kotamadya

. dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama koperasi .....................

sesuai surat mandat Nomor ......................... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

......................................................................

......................................................................

1. ............. (nama pengurus) : selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA**

1. ............. (nama pengurus) : ......................................................................
2. ......................................................................

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK-PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan penggabungan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Koperasi (sebut nama koperasinya) ditetapkan sebagai koperasi yang menerima penggabungan.

Pasal 2

Dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kesepakatan bersama antara lain :

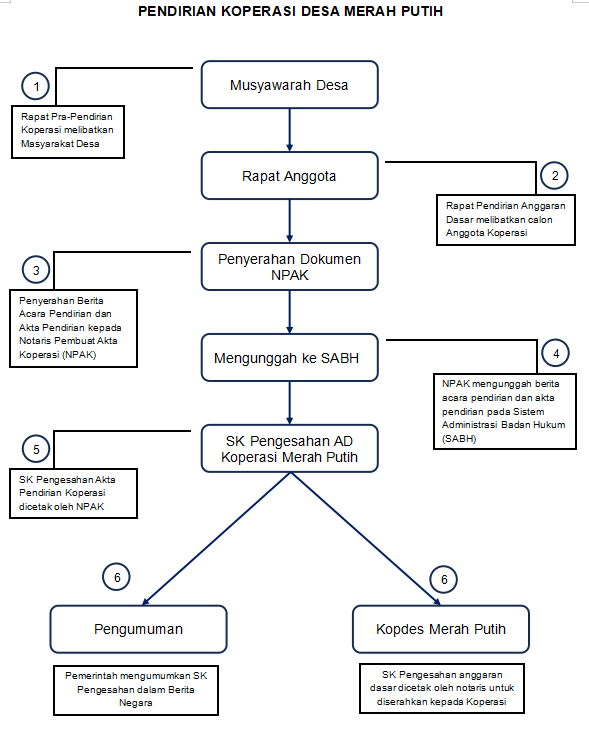
* keanggotaan
* kepengurusan
* modal
* hak dan kewajiban pihak
* jangka waktu
* pembagian SHU
* dan lain-lain

................,................................2025..........

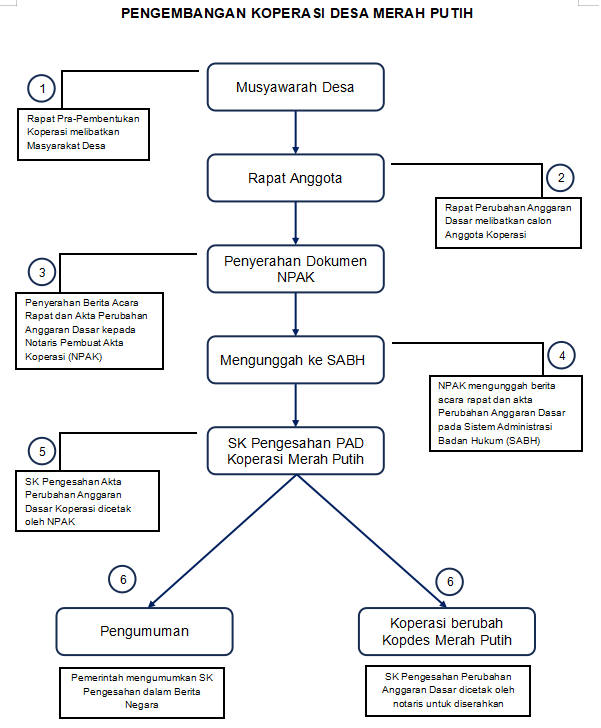
**PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA**

**(nama pengurus) (nama pengurus) (nama pengurus )**

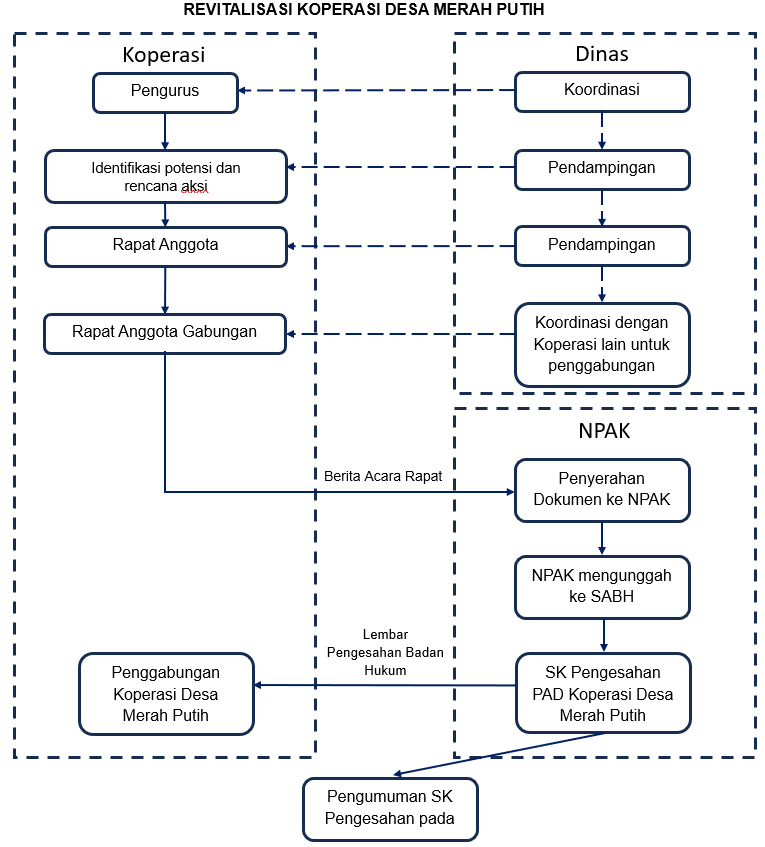
**Lampiran Nomor 4: Alur Pendirian Koperasi Desa Merah Putih**

****

**Lampiran Nomor 5: Alur Pengembangan Koperasi yang Telah Ada**

****

**Lampiran Nomor 6: Alur Revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih**



**Lampiran Nomor 7: Draft Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih**

**PENDIRIAN**

**KOPERASI (JENIS KOPERASI) DESA MERAH PUTIH  
(NAMA DESA SETEMPAT)**

**Nomor:** ………………

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)------Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia ……………………………-------------Menghadap kepada saya, …………**,** Sarjana Hukum,------------------Notaris di Kota/Kabupaten ......., dan berkantor di.........-dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal,-- dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -------------------

1. **Tuan/Nyonya……………………………**,lahir di ………………………………,pada---------tanggal…………………(………………), bertempat tinggal di Jalan--------  
   ………………………………, RT …… /RW ……… Kelurahan.…………………………,--------- Kecamatan………………………………, Kabupaten/Kota……………………………,--------- Provinsi……………………………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan- Nomor Induk:………………….--------------------------------------
2. **Tuan/Nyonya……………………………**------------------------------------
3. **Tuan/Nyonya……………………………**------------------------------------

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini ------bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan- Bendahara KOPERASI (JENIS KOPERASI) DESA MERAH PUTIH (NAMA--- DESA SETEMPAT) selaku kuasa dari para pendiri yang termuat--- dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di--- bawah tangan tertanggal.........., bertempat di......., yang- dihadiri oleh ..... orang pendiri yaitu: --------------------

1.

2.

3. dst..

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi\*) tersebut yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh------karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri-------- Koperasi.----------------------------------------------------

* Para Penghadap saya, Notaris kenal. ----------------------
* Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, --- dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin- dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran---- Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk----- selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”)------ sebagai berikut:------------------------------------------

**-------------------------BAB I-------------------------------**

**---------------------- PENDIRIAN ----------------------------**

**-------------- Nama dan Tempat Kedudukan --------------------**

**--------------------- Pasal 1 -------------------------------**

1. Koperasi ini bernama KOPERASI (JENIS KOPERASI) DESA MERAH PUTIH (NAMA DESA SETEMPAT) dan untuk selanjutnya dalam -Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.--------------------
2. Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan…………………………,---- RT……/RW……Nomor……Desa/Kelurahan……………………………,-------------- Kecamatan………………………………, Kabupaten/Kota………………………………,------Provinsi ……………………………….----------------------------------
3. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan ………………………………\*----
4. Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan

**------------------ Jangka Waktu Berdiri --------------------**

----------------------- **Pasal 2** ----------------------------

1. Koperasi didirikan untuk jangka waktu\* …………(……………………).---
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu\*\*----berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.---

**-----------Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----------**

**------------------------- Pasal 3 ---------------------------**

1. Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan----- kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.--------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ---dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara- lain yaitu ----------------------------------------------- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya------- Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (47111)--------

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya------- Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan------------------ Minimarket/Supermarket, *Hypermarket* Tradisional------- (47112)-----------------------------------------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ------ Manusia Di Apotik (47721)-----------------------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ------ Manusia Bukan Di Apotik (47723)-----------------------

- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia------ (47724)-----------------------------------------------

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi----- dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)--------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk------- Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)-----------

- Aktivitas *Cold Storage* (52102)-------------------------

- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)-------------

- Jasa Pengurusan Transportasi (52291)-------------------

1. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi----menyusun Rencana Strategis.-----------------------------

**---------------------------BAB II--------------------------**

**---------------------- MODAL KOPERASI ---------------------**

------------------------- **Pasal 4** -------------------------

1. Modal awal yang disetor\* pada saat pendirian Koperasi----sebesar Rp........... (..............)yang terdiri dari:-
2. Simpanan Pokok sebesar Rp. .........,- (...........).
3. Simpanan Wajib sebesar Rp. .........,- (...........).
4. Hibah\*\* sebesar Rp. .........,- (...........).-------
5. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan------------ modal pinjaman.------------------------------------------
6. Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat---- (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang-- berasal dari modal penyertaan.--------------------------

**-------------------------BAB III-----------------------------**

**---------------------- KEANGGOTAAN --------------------------**

**------------------------- Pasal 5----------------------------**

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----------------------
2. anggota; dan ----------------------------------------
3. anggota luar biasa. ---------------------------------
4. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai------- berikut:-------------------------------------------------
   1. Warga Negara Indonesia; -----------------------------
   2. cakap melakukan tindakan hukum; ---------------------
   3. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan-- wilayah keanggotaan Koperasi;------------------------
   4. telah melunasi simpanan pokok.-----------------------
5. Keanggotaan berakhir apabila: ---------------------------
   1. anggota bersangkutan meninggal dunia;----------------
   2. berhenti atas permintaan sendiri; atau---------------
   3. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi----lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -----ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga--dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
6. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan-- diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-------
7. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -------menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang --------pemberhentian anggota;-----------------------------------
8. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan---sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----Rumah Tangga.--------------------------------------------

**---------------- Kewajiban dan Hak Anggota -----------------**

**------------------------ Pasal 6 ---------------------------**

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:----------------------
   1. menghadiri Rapat Anggota; ---------------------------
   2. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan-----------usaha Koperasi;--------------------------------------
   3. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--------------
   4. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-
   5. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan--- oleh Koperasi.---------------------------------------
2. Setiap anggota berhak: ----------------------------------
   1. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah---------- disediakan oleh Koperasi;----------------------------
3. membela diri dalam Rapat Anggota apabila------------- diberhentikan sementara oleh Pengurus;---------------
4. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----

sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan -

Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan

oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;----------

1. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-------

miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau--- sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi---- membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,---- setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-------

1. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau------ Pengawas.--------------------------------------------

**-------------------- Anggota Luar Biasa ------------------------------------------------ Pasal 7 -------------------------**

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat- pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi------ persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga--- negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang-- berlaku.-----------------------------------------------------

**-------------- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa----------**

**------------------------ Pasal 8 ----------------------------**

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----------------
   1. memperoleh pelayanan Koperasi;-----------------------
   2. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
   3. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---dan kemajuan Koperasi.-------------------------------
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar--- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.-------------------------------------------

**-------------------------BAB IV------------------------------**

**--------------- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI ---------------**

**------------------------ Pasal 9 ----------------------------**

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang-------- terdiri dari:**------------------------------------------------**

* 1. Rapat Anggota.**--------------------------------------------**
  2. Pengurus.**-------------------------------------------------**
  3. Pengawas.**-------------------------------------------------**

**----------------------Rapat Anggota -------------------------**

**----------------------- Pasal 10 ----------------------------**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi----- dalam Koperasi.------------------------------------------
2. Rapat Anggota terdiri dari:------------------------------
3. Rapat Anggota;---------------------------------------
4. Rapat Anggota Luar Biasa.----------------------------
5. Rapat Anggota Koperasi berwenang:------------------------
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran----- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------
   2. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,------manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----------
   3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--Pengawas; -------------------------------------------
   4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran----------- pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan---- laporan keuangan;------------------------------------
   5. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;---------------------------
   6. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; --------------
   7. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan--pembubaran Koperasi. --------------------------------
6. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan---semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua-Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang-------- diajukan secara tertulis serta menandatangani------------ persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan------ cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.---

**--------------- Penyelenggaraan Rapat Anggota ---------------------------------------- Pasal 11 ------------------------**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.----
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan ------Pengawas.------------------------------------------------
3. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat ----yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus. -----------------------------------------------
4. Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal,-waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang- harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.---
5. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------

**--------------- Kuorum dan Pengambilan Keputusan ----------**

**------------------------ Pasal 12 -------------------------**

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ---------musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak-------tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat-- Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh- lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.------------
2. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota-------berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya---mempunyai satu hak suara. -------------------------------
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam--- buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain----dalam Anggaran Dasar.------------------------------------
4. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat--(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---- Rapat Anggota kedua dilaksanakan.------------------------
5. Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat---- Anggota pertama.-----------------------------------------
6. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya- sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri-- sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah ------anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota--------- Koperasi. -----------------------------------------------
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya- kepada anggota yang lain. -------------------------------
8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau-tertutup.------------------------------------------------
9. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau-----luring yang pengaturannya ditentukan dalam --------------Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------
10. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang,- dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok---atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang-----berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh-----diwakilkan.----------------------------------------------
11. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud----

pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-- Tangga.--------------------------------------------------

**---------------- Rapat Anggota Tahunan ----------------------**

**------------------------ Pasal 13 ---------------------------**

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1---(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota------ Tahunan.-------------------------------------------------
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling--lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.---------
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---------
   1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta-hasil yang telah dicapai;----------------------------
4. laporan keuangan\* yang sekurang-kurangnya terdiri---- dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun--buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan-tersebut;--------------------------------------------
5. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ----atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-
6. pembagian Sisa Hasil Usaha. -------------------------
7. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat---- Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--

**-------------------- Rapat Anggota Luar Biasa -------------**

**----------------------------Pasal 14 ----------------------**

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB*)* diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.----------------------
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara- lain:----------------------------------------------------
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran----- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------
3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--Pengawas;--------------------------------------------
4. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-------kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----------------
5. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi-- dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
6. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----
7. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam----- kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang-dibentuk oleh Koperasi.------------------------------
8. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan- Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah----- Tangga.--------------------------------------------------

**---------------------------Pengurus-------------------------**

**---------------------Persyaratan Pengurus ---------------------------------------------Pasal 15 --------------------------**

* + - 1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam---- Rapat Anggota; ------------------------------------------
      2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-------sebagai berikut:-----------------------------------------
  1. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, --------jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;------
  2. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang--------- dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;-------
  3. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan ----- Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi- Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan -- perundang-undangan;----------------------------------
  4. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta-semangat kewirausahaan;------------------------------
  5. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya---- 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;--
  6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana--yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau--- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu--- 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.------------------
     + 1. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus-- dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

**-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus------------------------------ Pasal 16--------------------------**

* + - 1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang--------dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan----- Rapat Anggota terdiri dari: -----------------------------
  1. seorang ketua; --------------------------------------
  2. seorang sekretaris; ---------------------------------
  3. seorang bendahara.-----------------------------------
     + 1. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
       2. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam------Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi- dan usaha Koperasi.--------------------------------------
       3. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku-- Daftar Pengurus.-----------------------------------------
       4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan ……**(**………………**)** tahun;----
       5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak---banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang--- sama.----------------------------------------------------
       6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai------ Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau-- janji di depan Rapat Anggota. ---------------------------
       7. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan----- sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran----- Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----------------------

**-------------------Kewenangan Pengurus-----------------------**

**------------------------ Pasal 17 ---------------------------**

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: ------------------------
2. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; ------------
3. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ---
4. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
5. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; ------------------------------------------------

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.------------------------------------------------

1. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------

**------------------------ PENGAWAS ---------------------------**

**------------------------- Pasal 18 --------------------------**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat-------- Anggota.-------------------------------------------------
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang-- memenuhi syarat sebagai berikut: ------------------------
3. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,--------- pengawasan dan akuntansi;----------------------------
4. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang----- pengawasan dan pemeriksaan;--------------------------
5. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-------------
6. pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi-------persyaratan standar kompetensi;----------------------
7. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua)----- tahun kecuali pada saat pendirian;-------------------
8. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu----koperasi atau komisaris atau direksi suatu ----------perusahaan yang dinyatakan bersalah karena ---------- menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan-- pailit; dan -----------------------------------------
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana--yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau--- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu--- 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.------------------
10. Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya sesuai dengan --------keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:--------------
    1. seorang Ketua; --------------------------------------
    2. ……………………………… (……………) orang Anggota;------------------
11. Pengawas dipilih untuk masa jabatan ………(……………)tahun.-----
12. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir-----dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya------ sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.----------
13. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-------------
14. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas ---wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat----- Anggota.-------------------------------------------------
15. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran----- Rumah Tangga.--------------------------------------------

------------------------- **Pasal 19** ------------------------

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam-Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-------------

**---------------------------BAB V-----------------------------**

**---------------------SISA HASIL USAHA -----------------------**

**--------------------- Cara Pembagian ------------------------------------------------- Pasal 20 --------------------------**

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:---------------------------------------------------
2. dana cadangan;---------------------------------------
3. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-
4. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;--------------------------------------------
5. dana pendidikan perkoperasian;-----------------------
6. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
7. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-
8. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------------------------------------

**----------------------- Dana Cadangan -----------------------**

------------------------- **Pasal 21**---------------------------

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----

**--------------------- Defisit Hasil Usaha -------------------**

**------------------------- Pasal 22 --------------------------**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -------menggunakan Dana Cadangan.-------------------------------
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat-(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.----------------
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk ------menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan--- pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.----------

**--------------------------BAB VI------------------------------------------ PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA ---------------------------------------- Pasal 23 -------------------------**

* + - 1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara---------keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----------
      2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat--------- mengangkat Pengelola.------------------------------------
      3. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,------------ pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih--- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan---- Khusus.--------------------------------------------------
      4. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.---------

**--------------------------BAB VII----------------------------**

**-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN----**

**------------------------ Pasal 24 ---------------------------**

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri--- dengan koperasi lain.------------------------------------
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan- Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.--------
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan------- anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan------------- diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri---------------- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)dari jumlah------- seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang------kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir--- dalam rapat.---------------------------------------------
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -------peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran---- Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.------------------

**------------------------BAB VIII-----------------------------**

**--------- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM --------**

**----------------------- Pembubaran --------------------------**

**------------------------ Pasal 25 ---------------------------**

* + - 1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: --------
  1. Keputusan Rapat Anggota; ----------------------------
  2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.--------------
     + 1. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-----empat)dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.---------------------------------------
       2. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota-- oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota. -----------------------------------
       3. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-----Anggota. ------------------------------------------------
       4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi ---- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---------
       5. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu ---melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.--------------

**------------------------- BAB IX----------------------------**

**------------------------- SANKSI ---------------------------**

**------------------------ Pasal 26 --------------------------**

* + - 1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola ------- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah---Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi ----dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. --------------------
      2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam------Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------

**---------------------------BAB X-----------------------------**

**---------------------KETENTUAN PENUTUP ----------------------**

**-------------------------Pasal 27----------------------------**

* + - 1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah--- Tangga selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. ------------------------------------------------
      2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal---sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.--------

**--------- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus --------**

**------------------------- Pasal 28 --------------------------**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----

Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan ---------

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak -----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------------------

* Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya --sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----------

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan--- Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----------- pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------------------------------

**Pengurus**: -----------------------------------------------

* Ketua : …………………………………;---------------------------
* Sekretaris : …………………………………;---------------------------
* Bendahara : …………………………………;---------------------------

**Pengawas**: -----------------------------------------------

* Ketua : …………………………………;---------------------------
* Anggota : …………………………………;---------------------------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh - masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat -- Pendirian.--------------------------------------------------

1. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa---- untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari---- instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan-- atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang--- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan------- dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain---- yang mungkin diperlukan.---------------------------------

-------------------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------------------

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di ……………………, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: --------------------------------------------------

1. Tuan ……………………………;--------------------------------------------
2. Tuan …………………………….--------------------------------------------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----------

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini; ----------------------------------------

Dibuat dengan ……………………;

**Lampiran Nomor 8: Draft Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa Merah Putih**

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**KOPERASI (JENIS KOPERASI) DESA MERAH PUTIH  
(NAMA DESA SETEMPAT)**

**Nomor:** ………………

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)------Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia ……………………………-------------Menghadap kepada saya, …………**,** Sarjana Hukum,------------------Notaris di Kota/Kabupaten ......., dan berkantor di.........-dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal,-- dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -------------------

1. **Tuan/Nyonya……………………………**,lahir di ………………………………,pada---------tanggal…………………(………………), bertempat tinggal di Jalan--------  
   ………………………………, RT …… /RW ………Kelurahan.…………………………,---------- Kecamatan………………………………, Kabupaten/Kota……………………………, --------Provinsi……………………………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:………………….--------------------------------------
2. **Tuan/Nyonya……………………………**------------------------------------
3. **Tuan/Nyonya……………………………**------------------------------------

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini ------bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan- Bendahara KOPERASI ......... berdasarkan Akta --------------- KOPERASI ....... Nomor ..... Tanggal ..... (.....).---------

Bahwa para penghadap bertindak atas kedudukannya tersebut di- atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu: ---------------- Bahwa pada hari ....., tanggal ..... (.....) bulan ......... (....) tahun ....(....) pukul ....., bertempat di ..........  
telah diadakan rapat anggota Koperasi ...... berkedudukan di .......... ------------------------------------------------ Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili oleh-- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang hadir, dan-- karenanya rapat tersebut adalah sah susunannya ada dapat--- mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat, karena--- syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi telah terpenuhi.-------------------------------------------- Bahwa para penghadap dalam kedudukan seperti tersebut di--- atas telah diberi Kuasa oleh Anggota Rapat itu untuk------- menyatakan keputusan Rapat tersebut dengan akta resmi di--- hadapan seorang Notaris.------------------------------------ Para Penghadap saya, Notaris kenal.------------------------- Adapun acara Rapat adalah untuk perubahan ----------------- 1. ......................----------------------------------  
 2. ......................----------------------------------  
 3. ......................----------------------------------  
 Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas -----  
 akhirnya dengan ini para penghadap menerangkan untuk ------ melakukan perubahan Anggaran Dasarnya sehingga selanjutnya-  
 menjadi berbunyi sebagai berikut:--------------------------  
**-----------------------BAB I---------------------------------**

**-------------- Nama dan Tempat Kedudukan --------------------**

**---------------------- Pasal 1 ------------------------------**

1. Koperasi ini bernama KOPERASI (JENIS KOPERASI) DESA----- MERAH PUTIH (NAMA DESA SETEMPAT) dan untuk selanjutnya- dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-------------
2. Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan…………………………, --- RT……/RW…… Nomor…… Desa/Kelurahan……………………………, ---------- Kecamatan………………………………, Kabupaten/Kota………………………………, ----Provinsi ……………………………….---------------------------------
3. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan ………………………………\*----
4. Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan

**------------------ Jangka Waktu Berdiri -------------------**

------------------------ **Pasal 2** --------------------------

1. Koperasi didirikan untuk jangka waktu\* …………(……………………).--
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu\*\*---berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.--

**-----------Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----------**

**------------------------- Pasal 3 ---------------------------**

1. Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan---- kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.--------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud --dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha ------- antara lain yaitu ---------------------------------------- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya-------  
    Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (47111)---------

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya------- Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan------------------ Minimarket/Supermarket, *Hypermarket* Tradisional------- (47112)-----------------------------------------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ------ Manusia Di Apotik (47721)-----------------------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ------ Manusia Bukan Di Apotik (47723)-----------------------

- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia------ (47724)-----------------------------------------------

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi----- dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)--------------

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk------- Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)-----------

- Aktivitas *Cold Storage* (52102)-------------------------

- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)-------------

- Jasa Pengurusan Transportasi (52291)-------------------

1. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi---menyusun Rencana Strategis.-----------------------------

**---------------------------BAB II--------------------------**

**---------------------- MODAL KOPERASI ---------------------**

------------------------- **Pasal 4** -------------------------

1. Modal awal yang disetor\* pada saat pendirian Koperasi-----sebesar Rp........... (..............)yang terdiri dari:--
2. Simpanan Pokok sebesar Rp. .........,- (...........).
3. Simpanan Wajib sebesar Rp. .........,- (...........).
4. Hibah\*\* sebesar Rp. .........,- (...........).-------
5. Dana Cadangan sebesar Rp. .........,- (...........).-
6. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal------- pinjaman.------------------------------------------------
7. Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.-----------------------------------

**-------------------------BAB III-----------------------------**

**---------------------- KEANGGOTAAN --------------------------**

**------------------------- Pasal 5----------------------------**

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----------------------
2. anggota; dan ----------------------------------------
3. anggota luar biasa. ---------------------------------
4. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai------- berikut:------------------------------------------------
5. Warga Negara Indonesia; -----------------------------
6. cakap melakukan tindakan hukum; ---------------------
7. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan-- wilayah keanggotaan Koperasi;------------------------
8. telah melunasi simpanan pokok.------------------------
9. Keanggotaan berakhir apabila: ---------------------------
10. anggota bersangkutan meninggal dunia;----------------
11. berhenti atas permintaan sendiri; atau---------------
12. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi----lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -----ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga--dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
13. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana- dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan-- diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-------
14. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -------menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang --------pemberhentian anggota;-----------------------------------
15. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan---sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----Rumah Tangga.--------------------------------------------

**---------------- Kewajiban dan Hak Anggota ----------------**

**------------------------ Pasal 6 --------------------------**

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:----------------------
2. menghadiri Rapat Anggota; ---------------------------
3. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan-----------usaha Koperasi;--------------------------------------
4. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;--------------
5. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-
6. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan--- oleh Koperasi.---------------------------------------
7. Setiap anggota berhak: ----------------------------------
   1. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah --------- disediakan oleh Koperasi;----------------------------
   2. membela diri dalam Rapat Anggota apabila ------------ diberhentikan sementara oleh Pengurus;---------------
   3. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----

sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan -

Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan

oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;----------

* 1. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-------

miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau--- sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi---- membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,---- setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-------

* 1. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau------ Pengawas.--------------------------------------------

**-------------------- Anggota Luar Biasa ------------------------------------------------ Pasal 7 -------------------------**

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat- pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi------ persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga--- negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang-- berlaku.-----------------------------------------------------

**-------------- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa----------**

**------------------------ Pasal 8 ---------------------------**

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----------------
2. memperoleh pelayanan Koperasi;-----------------------
3. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
4. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---dan kemajuan Koperasi.------------------------------
5. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar-- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.-------------------------------------------

**--------------------------BAB IV-----------------------------**

**--------------- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI ---------------**

**------------------------ Pasal 9 ----------------------------**

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang-------- terdiri dari:**------------------------------------------------**

1. Rapat Anggota.**--------------------------------------------**
2. Pengurus.**-------------------------------------------------**
3. Pengawas.**-------------------------------------------------**

**----------------------Rapat Anggota -------------------------**

**------------------------ Pasal 10 ---------------------------**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi------ dalam Koperasi.-------------------------------------------
2. Rapat Anggota terdiri dari:-------------------------------
3. Rapat Anggota;---------------------------------------
4. Rapat Anggota Luar Biasa.----------------------------
5. Rapat Anggota Koperasi berwenang:-------------------------
6. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran----- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------
7. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,------manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----------
8. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--Pengawas; -------------------------------------------
9. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran----------- pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan---- laporan keuangan;------------------------------------
10. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;---------------------------
11. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; --------------
12. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan--pembubaran Koperasi. --------------------------------
13. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan-----semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua---Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang---------- diajukan secara tertulis serta menandatangani-------------- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan--------cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan--- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.-----

**--------------- Penyelenggaraan Rapat Anggota ---------------------------------------- Pasal 11 --------------------------**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.----
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan ------ Pengawas.-----------------------------------------------
3. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat ----yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus. -----------------------------------------------
4. Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal,-waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang- harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.---
5. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------

**--------------- Kuorum dan Pengambilan Keputusan ----------**

**------------------------ Pasal 12 -------------------------**

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan --------musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak-------tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat-- Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh- lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.------------
2. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota------berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya---mempunyai satu hak suara. -------------------------------
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu--- per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar ---- dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan -- lain dalam Anggaran Dasar.-------------------------------
4. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---- Rapat Anggota kedua dilaksanakan.------------------------
5. Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan------ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan--- Rapat Anggota pertama.-----------------------------------
6. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri-- sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah------- anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota -------- Koperasi.------------------------------------------------
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -------------------------------
8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.------------------------------------------------
9. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau----luring yang pengaturannya ditentukan dalam --------------Anggaran Rumah Tangga.-----------------------------------
10. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor ------ cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem --- kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta- yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.----------------------------------------------
11. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud--

pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-- Tangga.--------------------------------------------------

**------------------ Rapat Anggota Tahunan --------------------**

**------------------------ Pasal 13 ---------------------------**

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1---(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota------ Tahunan.---------------------------------------------
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling--lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.---------
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ---------
   1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta-hasil yang telah dicapai;----------------------------
   2. laporan keuangan\* yang sekurang-kurangnya terdiri---- dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun--buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan-tersebut;--------------------------------------------
   3. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ----atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-
   4. pembagian Sisa Hasil Usaha. -------------------------
4. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat---- Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--

**-------------------- Rapat Anggota Luar Biasa -------------**

**----------------------------Pasal 14 ----------------------**

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB*)* diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.----------------------
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara- lain:----------------------------------------------------
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran----- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------
   2. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--Pengawas;--------------------------------------------
   3. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-------kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----------------
   4. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi-- dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
   5. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----
   6. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam----- kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang-dibentuk oleh Koperasi.------------------------------
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan- Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah----- Tangga.--------------------------------------------------

**---------------------------Pengurus-------------------------**

**---------------------Persyaratan Pengurus ---------------------------------------------Pasal 15 --------------------------**

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam----- Rapat Anggota; --------------------------------------------
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-------sebagai berikut:-------------------------------------------
3. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, --------jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;------
4. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang--------- dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;-------
5. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan ----- Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi- Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan -- perundang-undangan;----------------------------------
6. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta-semangat kewirausahaan;------------------------------
7. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya---- 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;--
8. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana--yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau--- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu--- 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.------------------
9. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus--- dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus------------------------------ Pasal 16--------------------------**

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang--------dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan----- Rapat Anggota terdiri dari: -----------------------------
2. seorang ketua; --------------------------------------
3. seorang sekretaris; ---------------------------------
4. seorang bendahara.-----------------------------------
5. Dalam hal diangkat lebih dari seorang-------------------- Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ----ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara-- Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat ------Anggota. ------------------------------------------------
6. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam------Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi- dan usaha Koperasi.--------------------------------------
7. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku-- Daftar Pengurus.-----------------------------------------
8. Pengurus dipilih untuk masa jabatan ……**(**………………**)** tahun;----
9. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir----- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya------ sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada------- jabatan yang sama.---------------------------------------
10. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai------ Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau-- janji di depan Rapat Anggota. ---------------------------
11. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan----- sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran----- Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----------------------

**-------------------Kewenangan Pengurus-----------------------**

**------------------------- Pasal 17 --------------------------**

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: ------------------------
2. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; ------------
3. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ---
4. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
5. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; ------------------------------------------------

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.------------------------------------------------

1. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------------------------

**------------------------ PENGAWAS ---------------------------**

**------------------------- Pasal 18 --------------------------**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat-------- Anggota.------------------------------------------------
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang-- memenuhi syarat sebagai berikut: -----------------------
3. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,--------- pengawasan dan akuntansi;----------------------------
4. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang----- pengawasan dan pemeriksaan;--------------------------
5. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-------------
6. pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi-------persyaratan standar kompetensi;----------------------
7. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua)----- tahun kecuali pada saat pendirian;-------------------
8. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu----koperasi atau komisaris atau direksi suatu ----------perusahaan yang dinyatakan bersalah karena ---------- menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan-- pailit; dan -----------------------------------------
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana--yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau--- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu--- 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.------------------
10. Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya sesuai dengan --------- keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:--------------
11. seorang Ketua; --------------------------------------
12. ……………………………… (……………) orang Anggota;------------------
13. Pengawas dipilih untuk masa jabatan ………(……………)tahun.-----
14. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir----- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya----- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.---------
15. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-------------
16. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas --- wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat---- Anggota.------------------------------------------------
17. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian------ serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam------- Anggaran Rumah Tangga.----------------------------------

-------------------------- **Pasal 19** ------------------------

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-------------

**---------------------------BAB V-----------------------------**

**---------------------SISA HASIL USAHA ----------------------**

**--------------------- Cara Pembagian ------------------------------------------------- Pasal 20 --------------------------**

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:---------------------------------------------------
2. dana cadangan;---------------------------------------
3. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-
4. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;--------------------------------------------
5. dana pendidikan perkoperasian;-----------------------
6. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
7. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-
8. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------------------------------------

**----------------------- Dana Cadangan -----------------------**

------------------------- **Pasal 21**---------------------------

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----

**--------------------- Defisit Hasil Usaha -------------------**

**------------------------ Pasal 22 -------------------------**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -------menggunakan Dana Cadangan.-------------------------------
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat--(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.----------------
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -------menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan--- pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.----------

**--------------------------BAB VI------------------------------------------ PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -------------------------------------- Pasal 23 ---------------------------**

* + - 1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara---------keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----------
      2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat--------- mengangkat Pengelola.------------------------------------
      3. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang,------------ pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih--- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan---- Khusus.--------------------------------------------------
      4. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.---------

**-------------------------BAB VII-----------------------------**

**-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN----**

**------------------------ Pasal 24 ---------------------------**

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri--- dengan koperasi lain.-----------------------------------
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan- Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-------
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan------- anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan------------ diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri--------------- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)dari jumlah------ seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang----- kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir-- dalam rapat.--------------------------------------------
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau ------- peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran--- Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----------------

**------------------------BAB VIII-----------------------------**

**--------- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM --------**

**----------------------- Pembubaran --------------------------**

**------------------------ Pasal 25 ---------------------------**

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: --------
2. Keputusan Rapat Anggota; ----------------------------
3. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.--------------
4. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a)------ diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus--dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)---- dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui----------- sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang-- hadir dalam rapat.---------------------------------------
5. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota-- oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota. -----------------------------------
6. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat----- Anggota. ------------------------------------------------
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi ---- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---------
8. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu --- melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.--------------------

**------------------------- BAB IX----------------------------**

**------------------------- SANKSI ---------------------------**

**------------------------ Pasal 26 --------------------------**

1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola ------- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah---  
    Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi----- dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. --------------------
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam------ Anggaran Rumah Tangga.----------------------------------

**---------------------------BAB X-----------------------------**

**---------------------KETENTUAN PENUTUP ----------------------**

**-------------------------Pasal 27----------------------------**

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah--- Tangga selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah ------- koperasi- berdiri. -------------------------------------
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal--- sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.-------

**--------- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus --------**

**------------------------- Pasal 28 --------------------------**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----

Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan ---------

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak -----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.----------------------

* Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya --sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----------

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan--Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----------pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama------- kalinya telah diangkat sebagai:-------------------------

**Pengurus**: ----------------------------------------------

* Ketua : …………………………………;--------------------------
* Sekretaris : …………………………………;--------------------------
* Bendahara : …………………………………;--------------------------

**Pengawas**: ----------------------------------------------

* Ketua : …………………………………;--------------------------
* Anggota : …………………………………;--------------------------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima--- oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.----------------------------------------

II.Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-------------------------------------

-------------------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------------------

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di ……………………, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -------------------------------------------------

1. Tuan ……………………………;--------------------------------------------
2. Tuan …………………………….--------------------------------------------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----------

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini;-----------------------------------------

Dibuat dengan ……………………;

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

**AHMAD ZABADI**

NIP. 19680212 199303 1 001